

BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)

I. PENDAHULUAN

Pada akhir bulan Nopember 2006 Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menutup Kongres Pembangunan Manusia Indonesia 2006 di Jakarta. Kongres ini merupakan serangkaian Konperensi yang telah diadakan di beberapa propinsi sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan manusia di Indonesia. Pada peristiwa itu Presiden RI sangat mengkhawatirkan pertumbuhan penduduk yang meningkat melebihi angka pertumbuhan 1,3 persen setahunnya. Karena kekhawatiran itu Presiden memerintahkan agar program KB direvitalisasi dan dikembangkan seperti di masa-masa yang lalu.

Dalam kesempatan yang sama Presiden juga mengkhawatirkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, angka kematian bayi dan anak, serta bahaya penyakit yang disebabkan serangan Virus HIV/AIDS. Dikawatirkan pula masih tingginya prevalensi malaria dan berbagai penyakit lain. Bahkan akhir-akhir kita juga diserang Virus Flu Burung yang tidak kalah ganasnya



l Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ,sangat mengawatirkan pertumbuhan penduduk yang meningkat melebihi angka pertumbuhan 1,3 persen setahunnya

dibandingkan serangan Virus HIV/AIDS yang belum ada obatnya itu.

Presiden juga sangat prihatin pada keadaan gizi anak-anak bangsa dan masyarakat yang mengakibatkan mutu manusia Indonesia tidak kunjung maju dibandingkan dengan mutu bangsa-bangsa lain di dunia. Rendahnya mutu penduduk itu juga disebabkan karena upaya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun belum kunjung tuntas. Buta aksara yang selama ini kita tangani masih berada

pada posisi yang menyedihkan. Upaya yang dijalankan dengan gigih seakan hanya jalan ditempat.

Akibatnya kemampuan keluarga dan penduduk untuk mempergunakan kesempatan yang terbuka tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan karena keluarga dan penduduk tidak mahir dan terampil, tetapi juga karena sukar mendapatkan modal untuk usaha yang nilai tambahnya relatif sukar dinaikkan.

Oleh karena itu selama tahun 2006 Yayasan Damandiri dengangihtelahmenyambutseruanPresidenuntukmerevitalisasi Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu sebagai salah satu lembaga pedesaan atau pedukuhan yang menampung dan menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan KB dan Kesehatan.

Posyandu yang dimasa lalu berkembang sebagai salah satu kunci pendukung pelayanan kepada masyarakat pedesaan itu telah ikut mengantar suksesnya Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan.

Dalam hubungan ini Yayasan Damandiri dan DNIKS di berbagai provinsi membantu advokasi melalui media massa, radio, surat kabar dan televisi, menggelar berbagai pertemuan di tingkat provinsi dan kabupaten serta mengembangkan program percontohan yang dengan sederhana bisa diambil alih oleh masyarakat setempat. Bantuan Yayasan dan Dewan Nasional tersebut telah menghasilkan penyegaran komitmen dan kegiatan operasional di lapangan. Secara bertahap Posyandu disegarkan dan berkembang menjadi lembaga pemberdayaan keluarga yang terpadu dan ampuh sehingga memungkinkan keluarga sederhana di pedesaan mampu memberdayakan anggota keluarganya secara mandiri.



*Secara bertahap
Posyandu
disegarkan dan
berkembang
menjadi lembaga
pemberdayaan
keluarga yang
terpadu dan
ampuh*

Seperti diketahui, dimasa lalu Posyandu dikembangkan oleh masyarakat sebagai dua jenis Pos Pelayanan, yaitu Pos Pelayanan KB dan Pos Pelayanan Kesehatan. Pos Pelayanan KB dibantu oleh jajaran BKKBN, sedangkan Pos Kesehatan Desa dibantu jajaran Departemen dan Dinas Kesehatan. Karena sasaran dan dukungan teknis yang diperlukan oleh dua jenis pos pelayanan itu hampir sama, sehingga akhirnya, dalam praktek, waktu dan kegiatan kedua jenis Pos itu oleh masyarakat dipadukan. Pemerintah, pada tanggal 29 Juni 1983, melalui Keputusan Bersama antara Kepala BKKBN Pusat, Dr. Haryono Suyono, dan Menteri Kesehatan RI, dr. Suwardjono Suryaningrat, mengukuhkan keterpaduan itu. Keputusan pengukuhan itu tertuang dalam bentuk Instruksi Bersama No 296/HK-OH/E3/1983 dan No 264/Menkes/VI/1983 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Sejak saat itu jumlah dan kegiatan Posyandu makin marak. Tim Penggerak PKK, utamanya kelompok kerja ke-IV, atau Pokja IV, menjadi penggerak utama pengembangan Posyandu di pedesaan. Sejak saat itu Posyandu diarahkan sebagai wadah petugas dan sukarelawan dari kalangan masyarakat dalam memberikan pemberdayaan dan pelayanan kepada keluarga secara paripurna. Dengan bantuan tenaga profesional maupun pelatihan, tenaga-tenaga yang melaksanakan kegiatan di Posyandu makin dikembangkan menjadi tenaga profesional.

Selama lebih duapuluh lima tahun tenaga pelaksana di Posyandu antara lain adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau sub PPKBD di tingkat pedukuhan, Petugas Pos KB Desa, Pos Kesehatan Desa yang umumnya Ibu-ibu sebagai tenaga sukarela yang dikembangkan dan berasal dari organisasi di tingkat Kelurahan dan Perdesaan,

seperti PKK, Muslimat NU, Aisyiah dan sebagainya. Umumnya para kader memperoleh pelatihan terlebih dahulu sebelum giat memberikan pelayanan secara rutin berupa advokasi, pemberian informasi, edukasi dan motivasi tentang KB dan Kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, para petugas sukarela itu dibantu oleh tenaga profesional seperti Petugas dan Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB dan PPLKB), Bidan Desa serta Dokter, dan Perawat atau tenaga paramedis lain yang ada di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.

Dalam tahun 2005, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional, mengeluarkan petunjuk agar segera dilakukan Revitalisasi atau Penyegaran Posyandu. Penyegaran Posyandu tersebut diperlukan ketika di masyarakat muncul gejala terjadinya gizi buruk, bangkitnya kembali polio serta penyakit menular lainnya. Banyak pihak mengkaitkan kejadian tersebut sebagai akibat makin menurunnya intensitas pembinaan dan kegiatan Posyandu.



Penyegaran Posyandu diperlukan ketika di masyarakat muncul gejala terjadinya gizi buruk, bangkitnya kembali polio serta penyakit menular lainnya

Dilain pihak, masalah dan kebutuhan masyarakat dan keluarga Indonesia makin berkembang. Kompleksitas masalah yang dihadapi juga bertambah tinggi. Padahal keluarga Indonesia belum berkembang dengan baik untuk mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Pembangunan manusia akan sangat efektif apabila dapat dilakukan dalam lembaga keluarga. Keluarga adalah lembaga utama, yang terdekat dan paling akrab dengan setiap anggotanya, juga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang bermutu dan kuat akan menjadi wahana pembangunan bangsa yang sangat efektif.

Karena itu diperlukan dukungan pemberdayaan, pelayanan paripurna dan dinamik agar setiap keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi utamanya dengan baik untuk membangun seluruh anggotanya. Apabila seluruh keluarga dapat membangun anak-anaknya dengan baik, maka seluruh anak bangsa akan dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang beriman, bermutu, handal dan sanggup membangun negara dan bangsanya dengan baik.



Karena sifat pemberdayaan keluarga harus paripurna, maka penyegaran Posyandu dengan pengertian sebagai lembaga pelayanan terpadu KB dan Kesehatan dianggap tidak cukup. Perlu dikembangkan lembaga

| Pembangunan manusia akan sangat efektif apabila dapat dilakukan dalam lembaga keluarga



! Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu

pemberdayaan dalam masyarakat, oleh masyarakat dan menjadi milik atau kebanggaan masyarakat. Lembaga ini harus bisa menampung berbagai masukan untuk mengembangkan keluarga agar mampu melaksanakan delapan fungsi utamanya. Lembaga ini adalah Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu, utamanya fungsi agama atau ketuhanan yang maha esa, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi lingkungan.

Buku ini berisi pedoman umum yang singkat dan sederhana agar setiap keluarga atau pimpinan di desa dengan mudah dan bebas dapat mengembangkan Posdaya. Dengan pedoman sederhana dan singkat ini diharapkan setiap pemimpin di desa dapat mengembangkan acuan yang lebih rinci sesuai dinamika di lingkungannya. Dinamika itu diperlukan agar pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga atau **POSDAYA**, yang tidak dapat

dipaksakan, bisa berjalan mulus. Kecepatan dan dinamika pengembangan Posdaya tergantung pada komitmen dan ketersediaan dukungan di setiap desanya.

II. POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)

A. PENGERTIAN

Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya kesehatan, pendidikan dan wirausaha, agar keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya.

Oleh karena itu program advokasi dan pemberdayaan pembangunan yang ditawarkan dalam Posdaya adalah program-program yang mendukung penyegaran fungsi-fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga yang intinya adalah keikutsertaan dalam KB, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang mapan.